



RENCANA KINERJA TAHUNAN

T.A. 2024



SKIPM CIREBON

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kinerja Pemerintah (Renja) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Cirebon merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang mempunyai visi “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya*”. Untuk mewujudkan visi tersebut, SKIPM Cirebon menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan;
2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKIPM Cirebon Tahun 2024 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai pada tahun anggaran 2024.

Demikian RKT SKIPM Cirebon ini disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Cirebon, 29 Januari 2024
Kepala Stasiun KIPM Cirebon




R. Rudi Barmara, S.Pi., M.P.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	.iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Umum.....	1
B. Tujuan	2
Bab II Rencana Kinerja Tahunan.....	3
A. Arah Kebijakan	3
B. Sasaran Strategis.....	3
C. Program Kerja	4
D. Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Cirebon.....	6
BAB III Penutup	8
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Nomenklatur program, sasaran program, indikator sasaran program dan target tahun 2024.....	4
Tabel 2. Rincian Anggaran Stasiun KIPM Cirebon tahun 2024 per jenis kegiatan	7
Tabel 3. Rincian Anggaran Stasiun KIPM Cirebon tahun 2024 per jenis belanja.....	7

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan SKIPM Cirebon disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi. Upaya ini juga sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang – Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan di atas, RKT merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

SKIPM Cirebon menyusun RKT yang menyajikan target kinerja dalam upaya pelaksanaan amanat yang tertuang dalam rencana strategis serta tugas pokok dan fungsi SKIPM Cirebon yang sekaligus merupakan komitmen guna mewujudkan visi “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Dengan disusunnya RKT sebagai panduan kegiatan tahun 2024, SKIPM Cirebon akan lebih fokus melaksanakan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana strategis.

Rencana Kinerja Tahunan adalah rencana detail kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis dan biasanya berjangka waktu satu tahunan. Oleh karena itu, RKT berperan penting sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran dalam melaksanakan akuntabilitas sekaligus sebagai gambaran komitmen segenap jajaran pegawai SKIPM Cirebon dalam mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan program kegiatan instansi. Oleh karenanya, Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja serta dasar kinerja yang akan diwujudkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilakukan penyesuaian susunan organisasi KKP guna mendukung pencapaian sasaran strategis termasuk di dalamnya perubahan nomenklatur Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Peranan SKIPM Cirebon di bidang mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan di lini terdepan sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Karantina ikan dan pengendalian mutu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, SKIPM Cirebon dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Dengan demikian peran SKIPM Cirebon sangat strategis dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan diantaranya:

1. Sebagai Rencana Capaian Kinerja Tahunan SKIPM Cirebon Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKIPM Cirebon melalui kegiatan yang direncanakan selama kurun waktu satu tahun.

BAB II**RENCANA KINERJA TAHUNAN****A. ARAH KEBIJAKAN**

Arah Kebijakan SKIPM Cirebon sebagai UPT BPPMHKP sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru yakni pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan tersebut akan diperkuat dengan :

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

B. SASARAN STRATEGIS

Mengacu pada visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2022-2024, sasaran strategis yang akan dicapai SKIPM Cirebon mencerminkan sesuatu yang bersifat kuantitatif sehingga dapat terdefinisi dan terukur dengan baik. Selain itu, sasaran strategis juga mengandung beberapa kriteria yang meliputi rasional, menantang, konsisten, spesifik dan dapat diukur. Dalam Rencana Strategis SKIPM Cirebon ditetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
2. Kapasitas dan kompetensi SDM;
3. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
4. Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan

perikanan efektif;

5. Reformasi birokrasi KKP yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian strategis KKP pada tahun 2024, maka KKP melakukan serangkaian penyesuaian tugas pokok dan fungsi pokok seluruh unit organisasi di lingkungan KKP yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang susunan organisasi. Salah satu perubahan yakni Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

C. PROGRAM KERJA

Program kerja SKIPM Cirebon tahun 2024 melanjutkan program yang telah disusun menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran.

Tabel 1. Nomenklatur program, sasaran program, indikator sasaran program dan target tahun 2024

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98%
		Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	5 Sertifikat
		Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	3 Lokasi
		Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	10 UPI

		Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	60 Produk
		UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Cirebon	21 UPI
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SKIPM Cirebon	84
		Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar, sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	2 Lokasi
WA-Program Dukungan Manajemen	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BKIPM	Indeks profesionalitas ASN SKIPM Cirebon	86
		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Cirebon	<u>82</u>
		Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon	100%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon	80%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Cirebon	93,76
		Nilai Kinerja Anggaran lingkup SKIPM Cirebon	82
		Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup SKIPM Cirebon	80%
		Tingkat kepatuhan BMN lingkup SKIPM Cirebon	80%

Target indikator sasaran program tersebut akan dicapai melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian Mutu

Kegiatan pengendalian mutu bertujuan meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi rendah bahkan tidak ada sama sekali.

2. Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan

Kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Penerapan sistem manajemen dipersyaratkan oleh negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak tahap produksi, penanganan, pengolahan sampai distribusinya.

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM

Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya BKIPM bertujuan memberikan dukungan pelaksanaan ketiga kegiatan yang lainnya. Kegiatan ini terdiri dari layanan perkantoran, operasional kantor dan pemeliharaan, layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan sarana internal dan layanan prasarana internal.

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN STASIUN KIPM CIREBON

Rencana kerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon tahun 2024 dituangkan dalam bentuk target indikator kegiatan. Target indikator kegiatan ditentukan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis selama tahun 2024. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rincian anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon tahun 2024 meliputi:

Tabel 2. Rincian Anggaran Stasiun KIPM Cirebon tahun 2024 per jenis kegiatan

Kode Kegiatan	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.296.567.000
3989	Pengendalian Mutu	258.460.000
3990	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	1.215.500.000

Alokasi anggaran kegiatan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2023 per jenis belanja dengan total anggaran Rp. 6.770.527.000 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran Stasiun KIPM Cirebon tahun 2024 per jenis belanja

Akun	Jenis Belanja	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp 3.781.223.000
52	Belanja Barang	Rp 2.989.304.000

BAB III

PENUTUP

SKIPM Cirebon sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terus berbenah dan berperan cukup strategis dalam keberhasilan pembangunan karantina ikan pada khususnya dan pembangunan kelautan dan perikanan pada umumnya. Rencana Kinerja Tahunan berfungsi sebagai pedoman terinci dalam melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu setahun yang sejalan dengan tujuan yang dirumuskan dalam renstra.

Tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ini memberikan arahan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pembangunan SKIPM Cirebon sesuai tujuan jangka menengah yang ingin dicapai. Tentu saja keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pegawai SKIPM Cirebon serta pihak terkait lainnya.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Di samping itu juga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yakni melindungi sumberdaya hayati ikan dan jaminan kesehatan komoditas perikanan yang dilalulintaskan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu.